

**ANALISIS HUBUNGAN KORUPSI,DEMOKRASI DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**LUCIA MAISON PUTRI**

**2016/16060014**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS HUBUNGAN KORUPSI, DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

**NAMA** : LUCIA MAISON PUTRI  
**BP/NIM** : 2016/16060014  
**KEAHLIAN** : EKONOMI PUBLIK  
**JURUSAN** : ILMU EKONOMI  
**FAKULTAS** : EKONOMI

Padang, Januari 2023

**Mengetahui**  
**Kepala Departemen Ilmu Ekonomi**



Dr. Novva Zulfa Riani, SE, M.Si  
NIP. 19711104 200501 2 001

**Diketahui oleh:**  
**Pembimbing**



Mike Triani, SE, MM  
NIP. 198401292009122002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Padang

### ANALISIS HUBUNGAN KORUPSI, DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Nama : Lucia Maison Putri  
TM/NIM : 2016/16060014  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas. : Ekonomi

Padang, Desember 2021

#### Tim Penguji

Nomor	Jabatan	Nama	TandaTangan
1.	Ketua	Mike Triani S.E,M.M	1. 
2.	Anggota	Dr. Alpon Satrianto, S.E,M.E	2. 
3.	Anggota	Dr. Novya Zulfa Riani, S.E,M,Si	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lucia Maison Putri  
Nim/Th.Masuk : 16060014/2016  
Tempat/Tanggal Lahir : Lagan Hilir/23 Agustus 1998  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
No. HP : 081378825224  
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Korupsi, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah di tandatangani asli oleh pembimbing, penguji dan kepala Departemen Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya siap menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini. Serta sanksi lainnya yang sesuai dengan sanksi yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 28 Januari 2023



Lucia Maison Putri  
Nim: 16060014

## ABSTRAK

**Lucia Maison Putri (2016/16060014) : Analisis Hubungan Korupsi, Demokrasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di Bawah Bimbingan Mike Triani, SE. MM.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis : (1) Respon korupsi akibat dari adanya *shock* demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (2) Respon demokrasi akibat dari adanya *shock* korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (3) Respon pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya *shock* korupsi dan demokrasi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif dan asosiatif, dimana data yang digunakan dari tahun 2014 sampai 2018 dari lembaga terkait. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Vector Autoregression (VAR)* melalui *uji Impulse Response Funtion (IRF)* dan *Variance Decomposition (VD)*.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : (1) Variabilitas korupsi tidak dikontribusi oleh demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang variabilitas korupsi dikontribusi oleh *shock* demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (2) Variabilitas demokrasi dikontribusi oleh korupsi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi hanya berkontribusi dalam jangka panjang (3) Variabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dikontribusi oleh korupsi dan demokrasi.

**Kata Kunci :** *Vector Autoregssion (VAR)*, IRF, VD, Korupsi, Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia, dan taufik-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Hubungan Korupsi, Demokrasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT sehingga kendala - kendala yang dihadapi tersebut dapat diatas. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Ibu Mike Triani, S.E, M.M selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran - saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua dan adik tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, semangat dan motivasi yang sangat besar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas - fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Melti Roza Adry, S.E, M.E selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, S.E, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E dan Ibu Novya Zulfa Riani, S.E, M.Si. selaku Dosen Penguji pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan - rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, 18 Agustus 2020

Penulis,

Lucia Maison Putri



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>11</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	12
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.17</b>	
A. Kajian Teori .....	17
1. Teori Korupsi.....	17
2. Teori Demokrasi .....	25
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44

E. DefenisiOperasional.....	45
F. TeknikAnalisisData.....	46
1. <i>VectorAutoregression</i> (VAR).....	46
2. Metode Empiris Analisis <i>VectorAutoregression</i> (VAR) .....	46
3. Langkah-langkah Analisis <i>VectorAutoregression</i> (VAR) .....	48
4. ImplementasiModelIVAR.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIANDANPEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Grafikan UmumWilayahPenelitian .....	53
B. HasilPenelitian.....	56
1. Analisis DeskriptifVariabelPenelitian.....	56
2. AnalisisInduktif.....	68
3. Implementasi Model Panel <i>VectorAutoregression</i> (VAR).....	61
4. PengujianHipotesis.....	87
C. Pembahasan.....	89
1. Respon korupsi akibat dari adanya <i>shock</i> demokrasi dan pertumbuhan ekonomidi Indonesia .....	89
2. Respon demokrasi akibat dari adanya <i>shock</i> korupsi dan pertumbuhan ekonomidiIndonesia .....	91
3. Respon pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya <i>shock</i> korupsi dan demokrasi di Indonesia .....	92
<b>BAB V KESIMPULANDANSARAN .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTARPUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018.....	6
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pengaduan Masyarakat 2014-2018	58
Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2014-2018.....	62
PDRB Per Provinsi Tahun 2014-2018.....	66
Hasil Uji Stasioner Variabel Korupsi .....	69
Hasil Uji Stasioner Variabel Demokrasi.....	70
Hasil Uji Stasioner Variabel Pertumbuhan Ekonomi.....	71
Hasil Uji Kointegrasi.....	72
Hasil Lag Optimum.....	74
Hasil Uji Granger Causality.....	75
Hasil Estimasi PVAR.....	66
Hasil VLD .....	66

## DAFTAR GRAFIK

Kasus Korupsi dan Nilai Kerugian Menurut Sektor Tahun 2018 .....	2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan Indonesia Tahun 2016-2018.....	8
Elemen Biaya Sosial Korupsi.....	20
..... Kerangka Konseptual Korupsi, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia .....	41
Hasil Uji Stabilitas .....	81
Hasil IRF .....	82

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang memiliki kasus korupsi yang terbilang tinggi, kasus korupsi di Negara sedang berkembang seperti Indonesia memiliki banyak masalah dalam kebijakan pemerintah AryaMaheka,(2008). Korupsi merupakan masalah panjang dalam penyelidikan perekonomian di Indonesia, korupsi pada umumnya merupakan hambatan terbesar dalam masalah pembangunan disektor publik. Sehingga korupsi sering mengakibatkan terjadinya penurunan investasi, pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya produktivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan hanya saja dalam upaya penindakan untuk memberantas korupsi di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, baik dalam hukuman atau sanksi yang diberikan masih terbilang ringan ketimbang hukuman yang ada di Negara-negara lainnya atau tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku koruptor Satjipto Raharjo,(2006).

Masalah korupsi di Indonesia maupun di Negara-negara lainnya sedang marak diperbincangkan dikarenakan korupsi sangat sulit dibenahi, Pada setiap Negara masih dihadapi dengan masalah korupsi yang menyebabkan melemahnya perekonomian suatu Negara khususnya di Negara-negaraberkembang seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Faktor yang

menyebabkan perbedaan tingkat korupsi yang terjadi dinegara berkembangseperti di Indonesia maupun dengan Negara lainnya yaitu didasari dengan adanya hambatan-hambatan dalam bentukstruktural,kultural,instrumental dan hambatan berupa manajemen,Setiadi Wicpto,(2018).

Penelitian (Mamadu, 2006; Okere, 2005; Sen, 1999; Jain, 2001; Bank Dunia,2011; Huntington, 1968) mengatakan bahwakorupsi adalah "Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi".Korupsi dapat menyebabkan rusaknya perkembangan ekonomi suatu negara,Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan korupsi dalam proyek).Sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaa proyek tersebut tidak akan tercapai.Korupsi sangat mempengaruhi beberapa sektor pemerintahan di Indonesia yaitu sektor yang sangat di pengaruhi adalah sektor keuangan.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2019

**Grafik 1.1 Kasus korupsi dan nilai kerugian menurut sektor Tahun 2018**

Berdasarkan grafik 1.1 memperlihatkan pergerakan tingkat korupsi dan nilai kerugian berdasarkan sektor yang diperoleh selama tahun 2018 cenderung berfluktuasi. Kasus korupsi yang paling tinggi yaitu di Sektor anggaran desa dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar sektor Pemerintahan, pendidikan, Pengairan, pertanian hingga ke sektor energi dan listrik mengalami penurunan pada tingkat kasus korupsi. Namun pada nilai kerugian yang ditimbulkan mengalami fluktuasi. Sementara sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus).

Selanjutnya, masalah demokrasi yang ada di Negara berkembang khususnya di Indonesia yang perlu kita benahi yaitu masalah korupsi dan demokrasi yang berpengaruh terhadap system pemerintahan suatu Negara. Korupsi berada pada system pemerintahan yang seperti apapun jenisnya, baik Negara secara sosialis maupun demokratis ataupun negara yang berkaitan dengan keagamaan masalah korupsi akan tetap ada, Kompas.com, (2020). Dalam menangani masalah korupsi antara Negara kerajaan dengan Negara demokratis memiliki perbedaan dalam system pemerintahannya.

Dinegara kerajaan seorang raja memiliki kewenangan dalam menggunakan fasilitas rakyat baik uang rakyat maupun keuntungan-keuntungan lainnya yang diperoleh oleh para pejabat Negara, karena tidak adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan Negara dengan kekayaan pribadi raja tersebut. Berbeda dengan Negara yang menggunakan system demokratis dimana Negara tersebut di pimpin oleh seorang presiden

yang dipilih langsung oleh rakyat tersebut,yaitu Negara yang lebih mengutamakan suara rakyat.Negara demokratis seorang pemimpin Negara/presiden tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menggunakan uang rakyat untuk keuntungan pribadi,apabila terdapat seorang pemimpin Negara ataupun wakil-wakil rakyat menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi maka para pejabat tersebut telah melakukan tindakan korupsi.Hariadi TM,(2013).

Pasca reformasi Indonesia telah memproklamkan diri sebagai Negara demokratis pada tahun 1998,dengan tujuan utama untuk memberantas masalah KKN yaitu Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.Demokratis merupakan sistem yang terbaik saat ini,dimana banyak Negara yang telah menyatakan diri sebagai negara demokratis.Pada era saat ini demokratis modern banyak dipakai khususnya Indonesia yang menggunakan sistem demokratis perwakilan atau parlementerianisme yaitu dengan memilih wakil-wakil politik dalam menjalankan tugas-tugas Negara dengan melakukan pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakatIndonesia.

Pemilihan Umum merupakan bagian demokrasi,dimana terdapat rekrutmen dan seleksi politik yang harus dilakukan sehingga terdapat banyak kesulitan dalam proses pemilihan umum,pada saat-saat seperti inilah terjadi jual-beli jabatan,suap-menyuap,korupsi dan lain sebagainya.Kesempatan yang digunakan oleh para pejabat adalah disaatadanya pemungutan suara dalam pemilihan umum dimana akan banyak para calon pejabat menggunakan taktik untuk menyuap para masyarakat agar dapat memilihnya dalam pemilihan umum. Namun



kenyataannya system demokratis dimanfaatkan dan disalahgunakan dalam memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Tabel 1.1 menunjukkan indeks demokrasi masyarakat Indonesia berdasarkan aspek disetiap provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan Aspek kebebasan sipil, Aspek hak-hak politik dan Aspek lembaga demokrasi.

**Tabel 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018**

<b>Provinsi</b>	<b>Aspek Kebebasan Sipil</b>	<b>Aspek Hak-Hak Politik</b>	<b>Aspek Lembaga Demokrasi</b>
Acch	96.79	68.09	77.67
Sumatera Utara	76.54	62.61	51.69
Sumatera Barat	55.32	62.84	88.52
Riau	86.88	62.77	89.47
Jambi	72.88	62.76	72.92
Sumatera Selatan	83.13	73.12	76.01
Bengkulu	78.77	62.18	74.13
Lampung	77.29	59.53	72.35
Kep. Bangka Belitung	80.95	73.56	63.76
Kep. Riau	91.05	77.54	66.8
DKI Jakarta	95.09	75.43	87.82
Jawa Barat	74.9	64.78	54.8
Jawa Tengah	76.21	66.92	75.42
DI Yogyakarta	90.6	75.07	77.66
Jawa Timur	77.21	67.45	75.97
Banten	86.59	60.11	79.4
Bali	94.72	68.08	89.55
Nusa Tenggara Barat	78.28	62.08	86.11
Nusa Tenggara Timur	94	71.85	84.28
Kalimantan Barat	93.87	64.01	73.08
Kalimantan Tengah	90.09	50.46	80.65
Kalimantan Selatan	69.26	83.03	88.37
Kalimantan Timur	90.99	61.38	72.22
Kalimantan Utara	97.36	75.8	68.95
Sulawesi Utara	88.9	69.53	76.86
Sulawesi Tengah	91.9	54.94	86.72
Sulawesi Selatan	72.44	64.05	79.75
Sulawesi Tenggara	79.77	67.59	78.16
Gorontalo	79.33	64.95	76.26
Sulawesi Barat	87.41	55.05	77.45

Maluku	81.38	72.86	72.32
Maluku Utara	78.94	62.39	78.92
Papua Barat	82.11	40.11	57.21
Papua	84.36	47.9	57.05

*Sumber:Badan Pusat Statistik,2018(Data Diolah)*

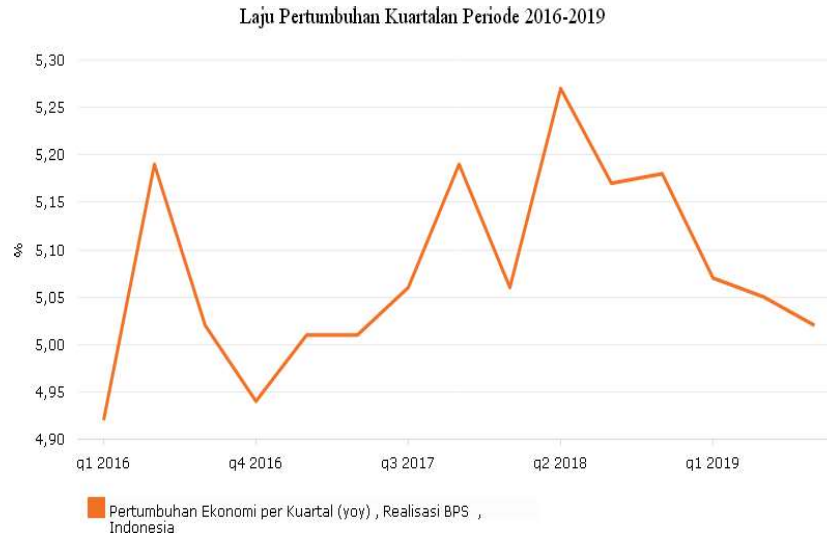
Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan indeks demokrasi masyarakat Indonesia di tahun 2018 perkembangan demokrasi Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018 yaitu berdasarkan aspek disetiap provinsi di Indonesia.Pada aspek kebebasan sipil di tahun 2018 indeks demokrasi tertinggi berada di provinsi Kalimantan utara yaitu sebanyak 97.36 ribu selanjutnya berdasarkan aspek hak-hak politik indeks demokrasi tertinggi berada di provinsi Kalimantan selatan yaitu sebanyak 83.03 ribu dan berdasarkan aspek lembaga demokrasi provinsi yang paling tertinggi tingkat demokrasinya adalah di provinsi bali yaitu sebanyak 89.55 ribu. Hal ini menunjukkan indeks demokrasi masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.indeks demokrasi Indonesia tahun 2018 meningkat tipis sebanyak 72,39 yaitu sebanyak (0,28 poin) dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 indeks demokrasi Indonesia yaitu berada diangka72,11.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa indeks demokrasi Indonesia masih berada di posisi sedang.Perubahanangka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2017-2018 yaitu dipengaruhi oleh penurunan dalam aspek kebebasan sipil yaitu sebesar (0.29 poin) dari 78,75 menjadi 78,46 selanjutnya penurunan aspek ha-hak politik yaitu sebesar (0,84 poin) dari 66,63 menjadi 65,79 dan peningkatan aspek lembaga demokrasi sebanyak 2,76 poin yaitu dari 72,49

menjadi 75,25.

Demokrasi dapat dilihat pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam memilih wakil-wakil rakyat untuk memperoleh jabatan pemerintahan pada suatu Negara, tingkat partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pemilihan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam memandang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ahli ekonom, sejarawan serta ahli politik telah terlibat dalam debat yang panjang tentang korupsi yang membahayakan pertumbuhan ekonomi Nawatmi sri,(2014). Selama ini, permasalahan korupsi seringkali terjadi pada wilayah pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di dalam masalah investasi publik. Adanya interaksi antara pelaku usaha dengan penyedia layanan publik dimana banyak dimanfaatkan oleh para oknum birokrat untuk mencari tambahan isi dompet mereka dengan keuntungan besar. Sebenarnya, ekonomi tumbuh, hanya saja modal untuk meningkatkan nilai tambah tersebut dikorupsi sehingga kegiatan ekonomi dan birokrasi tidak berjalan dengan sebagaimana semestinya sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan tak jauh dari 5 persen.



Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2018

### **Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan Indonesia tahun 2016-2018.**

Grafik 1.3 memperlihatkan pergerakan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016-2018 berdasarkan kuartalan mengalami fluktuasi, dimana tahun 2016 kuartalan I berada pada 5,19 persen, sedangkan pada tahun 2016 kuartalan IV mengalami penurunan yaitu sebesar 4,94 persen. Pada tahun 2017 kuartalan III tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu sebanyak 5,1 persen sedangkan pada tahun 2018 kuartalan II mengalami penurunan yaitu sebesar 5,6 persen dan kuartalan I tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,7 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2019, secara tahunan mencapai 5,07 persen. Ini merupakan capaian awal tahun tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir. Dibandingkan kuartal sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi ditengah hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa Negara tetangga masih tumbuh

positif. Perdagangan dengan Tiongkok misalnya, tumbuh 6,4 persen (Q1/19) lebih lambat dibandingkan 6,8 persen (Q1/18). Dengan Amerika Serikat menguat menjadi 3,2 persen, sedangkan dengan Singapura melambat menjadi 1,3 persen.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kasus korupsi tidak sejalan dengan perkembangan demokrasi dan perekonomian di Indonesia saat-saat ini. Hal ini dikarenakan tingkat korupsi di Indonesia yang meningkat di Indonesia semakin memperburuk perkembangan demokrasi dan menurunnya produktivitas masyarakat. Masalah yang berkembang saat ini dimana masyarakat semakin sulit menyampaikan aspirasi atau terhambatnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, dimana pemerintah semakin tertutup pada masyarakat dan perekonomian semakin menyengsarakan rakyat. Hal inilah yang membuat masalah sistem pemerintahan di Indonesia semakin buruk di masyarakat, sehingga menimbulkan masalah-masalah lain di pemerintahan Indonesia. Franz Magnis Suseno (2003) pernah menulis: "Mengapa rezim Pak Soeharto jatuh? Dikarenakan kebijakan ekonomi yang tidak tepat? Atau karena kesalahan konseptual? Bukan, tapi dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang menggrogoti ketahanan perekonomian negara, menggrogoti ketahanan hukum, ketahanan moral dan ketahanan bangsa Indonesia." Keterkaitan antara korupsi dengan demokrasi bersifat negatif yaitu apabila tingkat korupsi meningkat maka akan menyebabkan menurunnya sistem demokrasi di negara tersebut. Hubungan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi yaitu bersifat signifikan dan adapula sebagian ilmuwan

mengatakan bahwa demokrasi dapat berpengaruh secara langsung apabila suatu Negara ditopang dengan sistem politik demokrasi. Salah satu bukti empiris yang menunjukkan hubungan antar variabel yaitu Penelitian Kotera, Okada dan Samreth (2012) melakukan penelitian mengenai Ukuran pemerintah, demokrasi, dan korupsi: Investigasi empiris. Dimana hasilnya mengatakan bahwa hasil estimasi menunjukkan peningkatan ukuran pemerintah dapat menyebabkan penurunan korupsi jika tingkat demokrasi cukup tinggi dan, sebaliknya, dapat menyebabkan peningkatan korupsi jika terlalu rendahnya demokrasi. Selanjutnya adalah penelitian Salahodjaev (2015) meneliti tentang Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi: Peran intelijen dalam regresi lintas negara. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi memiliki dampak negatif atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara empiris menyelidiki efek interaktif demokrasi dan intelijen terhadap pertumbuhan ekonomi, menggunakan data dari 93 negara, selama periode 1970–2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan-hubungan antar demokrasi dan pertumbuhan PDB riil bervariasi dengan tingkat kemampuan kognitif suatu negara. Hasilnya tetap kuat untuk berbagai teknik estimasi, variabel kontrol dan periode waktu.

Alfada (2019) melakukan penelitian mengenai Dampak destruktif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: model ambang batas. Dimana hasilnya mengatakan bahwa dampak korupsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi memburuk apabila tingkat korupsi di bawah ambang batas dan dampak destruktif korupsi tampak lebih kuat untuk provinsi dengan tingkat korupsi di atas ambang batas. Sedangkan

penelitian Gründler dan Potrafke (2019) mengenai Korupsi dan pertumbuhan ekonomi: berdasarkan Bukti empiris menunjukkan hasil bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Prediksi teoritis tentang bagaimana korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi bersifat ambigu. Hipotesa "grease the wheels" meramalkan bahwa korupsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan hipotesis "sand the wheel" memperkirakan bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat hubungan dan keterkaitan masalah korupsi, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dimana variabel korupsi mempengaruhi tingkat demokrasi dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut maka dibutuhkan penjelasan yang urgen untuk bisa dikatakan bahwa terdapatnya hubungan antar variabel. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia saat ini sangat marak memperbincangkan masalah korupsi, dimana kasus korupsi di Indonesia saat-saat ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, dimana masyarakat merasa telah ditipu atau diperbodohi oleh pemerintahan sehingga masyarakat merasa kurang percaya kepada pemerintahan Indonesia. Demokrasi diciptakan agar dapat memberantas korupsi yang ada di Indonesia, sehingga sistem demokrasi diharapkan dapat memberantas korupsi di Indonesia. Namun, masalah yang dihadapi sekarang malah masalah korupsi yang meredupkan demokratisasi di Indonesia semakin menghilang, dimana kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi tidak diberikan. Hal ini sama pada zaman pemerintahan Soeharto dimana sistem pemerintahan Soeharto hancur

karena banyaknya kasus korupsi, sehingga menjatuhkan sistem pemerintahan dan ketahanan sosial dan ekonomi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masalah korupsi memang sejak lama telah menjadi biang kerok dalam masalah ketahanan dan perekonomian negara Indonesia. Hal ini juga menjadi bukti bahwa korupsi dapat menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia, dan juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Masalah-masalah seperti inilah yang menjadi bahan penelitian untuk memecahkan masalah – masalah yang sejak lama menjadi permasalahan di negara Indonesia.

Kondisi ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi dengan adanya kebijakan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa keadaan politik dan kebijakan publik sangat memicu pergerakan ekonomi di Indonesia. Berkembangnya suatu perekonomian dengan cepat yaitu didasari dengan adanya kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah yang dimiliki. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Korupsi, Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa volatilitas antar variabel saling berkaitan satu sama lain. Selain itu pembuktian antara teori dengan kondisi yang terjadi pada keadaan pemerintah dan kebijakan pemerintah memiliki kesamaan. Seperti yang terjadi antara Korupsi dengan demokrasi dimana, semakin meningkatnya tingkat demokrasi akan menurunkan tingkat korupsi dan begitu juga sebaliknya. Tingkat korupsi, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain dimana, Tingkat korupsi yang



semakin meningkat justru menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan begitupun sebaliknya. Pengaruh adanya peningkatan tingkat demokrasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Kemudian berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ikut memperkuat dugaan penulis untuk melakukan penelitian terhadap keterkaitan antar variabel tersebut dengan objek penelitian yaitu di Indonesia. Dari penelitian itu juga manakah yang nanti akan membuktikan hubungan tersebut jika dilakukan di Indonesia. Maka, dari itu penulis ingin melakukan penelitian tersebut di Indonesia dengan judul ***“Analisis Kausalitas Korupsi, Demokrasi Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana respon Korupsi akibat dari adanya shock Demokrasi dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana respon Demokrasi akibat dari adanya shock Korupsi dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana respon Pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya shock korupsi dan Demokrasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Respon Korupsi akibat dari adanya shock Demokrasi dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Respon Demokrasi akibat dari adanya shock korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Respon Pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya shock korupsi dan Demokrasi di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Bagi Penulis, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kausalitas antara Korupsi, Demokrasi dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, Ilmu ekonomi public dan Ekonomipolitik.
3. Pengambil Kebijakan yaitu Pemerintahan, Sektor Publik dan Layanan Publik. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.
4. Untuk penelitian lebih lanjut, ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang relevan di Indonesia.